JMPIS: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
E-ISSN: 2716-375x
P-ISSN: 2716-3758
DINASTI REVIEW
https://dinastirev.org/JMPIS dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 05 Desember 2024 | **Revised:** 11 Januari 2025 | **Accepted:** 24 Januari 2025

Analisis Implementasi RKAS di SD Negeri 1 Tolisu

Cindi Salwa Aulia[1*], Yusdin Gagaramusu[2]
[1]Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, cindysalwaaulia@gmail.com
[2]Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, yusdin@untad.ac.id

[*]Corresponding Author: cindysalwaaulia@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the implementation of the School Activity and Budget Plan (RKAS) at SD Negeri 01 Tolisu, with a focus on the discrepancies between the budgeted costs and the actual expenditures incurred during budget implementation. The approach used in this study is a qualitative approach. The research findings indicate that the preparation and implementation of the RKAS at this school have been carried out effectively and in accordance with the applicable guidelines, involving various stakeholders such as the school committee and parents. Despite policy changes, such as the reduction in the stages of fund disbursement, the school has managed to maintain smooth budget planning. The implementation of the RKAS demonstrates effective budget management, which not only enhances efficiency in fund utilization but also supports the sustainability of quality educational activities. Additionally, the school achieves a 100% fund absorption rate each year. The RKAS reporting process at SD Negeri 01 Tolisu has also been carried out well, despite facing challenges in 2022 regarding incomplete documentation, which was subsequently addressed. The school adheres to principles of transparency, accountability, flexibility, effectiveness, and efficiency in fund management, as reflected in the announcement of fund usage to the teaching staff, school committee, and parents, as well as in the accountable financial reports.*

Keywords: *Implementation, RKAS, Elementary School*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Negeri 01 Tolisu, dengan fokus pada ketidaksesuaian antara biaya yang ditetapkan dan biaya yang sebenarnya dikeluarkan dalam pelaksanaan anggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan RKAS di sekolah ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Juknis yang berlaku, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti komite sekolah dan orang tua murid. Meskipun terdapat perubahan kebijakan, seperti pengurangan tahap pencairan dana, sekolah tetap dapat menjaga kelancaran perencanaan anggaran. Pelaksanaan RKAS menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif, pengeloaan anggaran ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana, tetapi juga mendukung keberlanjutan kegiatan pendidikan yang berkualitas.Serta memiliki tingkat serapan dana yang mencapai 100% setiap tahunnya. Proses pelaporan RKAS di SD Negeri 1 Tolisu juga berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala pada tahun 2022

terkait ketidaklengkapan dokumen yang kemudian diperbaiki. Sekolah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana, yang tercermin dalam pengumuman penggunaan dana kepada Dewan Guru, Komite Sekolah, dan orang tua murid, serta laporan penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Implementasi, RKAS, Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Sekolah Dasar (SD) merupakan lembaga pendidikan yang juga merupakan bagian dari lembaga negara yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan dana yang dikelola. Sekolah diharapkan dapat mengelola dananya dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku, agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 2, pengelolaan dana pendidikan harus mengacu pada prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola dapat digunakan dengan cara yang paling efisien dan sesuai dengan kebutuhan sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKAS, RKAS didefinisikan sebagai dokumen yang berisi perencanaan program pendidikan, kegiatan, dan anggaran yang disusun serta diimplementasikan oleh kepala sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Aeni (2022) menyatakan bahwa implementasi juga dapat dipahami sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan yang menimbulkan dampak tertentu. Nugroho dalam (Novrialdi dkk, 2024) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan mekanisme operasional dalam prosedur birokrasi, tetapi juga dengan konflik pengambilan keputusan serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diraih oleh kelompok sasaran. McLaughlin dan Schubert, yang dikutip oleh (Magdalena dkk, 2021), juga menyederhanakan pengertian implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan, yang mencakup aktivitas-aktivitas yang saling menyesuaikan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup penerapan kebijakan dalam tindakan praktis, pengelolaan konflik keputusan, serta evaluasi dampak terhadap kelompok sasaran. Dalam konteks tahapan implementasi RKAS, hal ini mengharuskan setiap tahap untuk mengikuti pedoman Juknis BOS secara teliti, sehingga dapat dilaksanakan dengan sistematis dan efektif, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan baik dan memberikan dampak positif yang diinginkan.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah dokumen yang merinci biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk satu tahun anggaran. RKAS ini harus disetujui oleh kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat untuk sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan untuk sekolah swasta. RKAS berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dan harus disusun sesuai dengan rencana strategis sekolah. Masa berlaku RKAS adalah satu tahun ajaran, mencakup pendapatan dan belanja (pengeluaran). RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah.Utari (2023) . Dalam mengelola RKAS diperlukannya Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat pendidikan dasar

dan menengah secara nasional. Sistem ARKAS, yang diwajibkan untuk digunakan dalam pelaporan dana BOS, mempermudah sekolah dalam pengelolaan dana secara transparan dan efisien. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, yang mengharuskan setiap sekolah, termasuk SMP, untuk menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan RKAS. (Suwarno dkk, 2022). Implementasi ARKAS bersifat wajib bagi setiap sekolah dalam melaporkan penggunaan dana BOS, dan diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan dana BOS dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. (Adnyani dkk, 2023).

Lestari (2023) juga menambahkan bahwa dalam proses penyusunan RKAS di SD IT Robbani Cendekia Ponorogo, akuntabilitas sangat dijaga, yang tercermin dari adanya rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait, seperti komite, guru, bendahara, dan kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan konsep perencanaan yang kolaboratif dan melibatkan banyak pihak dalam pembuatan keputusan anggaran yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Perencanaan dana melalui penyusunan RKAS di SMA Negeri 4 Singaraja telah mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Permendikbud Tahun 2020. Ini menunjukkan pentingnya kesesuaian antara perencanaan anggaran dan implementasi di lapangan untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. (Saisarani dkk, 2021). Sekolah yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terbatas mengenai proses dan prosedur audit catatan keuangan, termasuk ketidakmampuan untuk mengintrepretasikan laporan keuangan yang telah diaudit, akan mengalami kesulitas dalam memperoleh dana. Pemahaman yang kurang mendalam mengenai audit keuangan dapat menyebabkan kesalahan dalam mengelola dan melaporkan keuangan sekolah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kredibilitas sekolah.Simon dkk, (2023).

Namun, sebagaimana yang ditemukan dalam observasi di SD Negeri 01 Tolisu, masih ada ketidaksesuaian jumlah biaya yang ditetapkan dengan jumlah biaya pada saat pelaksanaan implementasi RKAS. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam pengelolaan dan implementasi RKAS agar dapat lebih efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RKAS di SD Negeri 01 Tolisu dari tahun 2021 hingga 2024. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas implementasi RKAS di SD Negeri 01 Tolisu. Dengan melakukan analisis implementasi RKAS, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan keuangan sekolah yang lebih transparan dan efisien.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Tolisu, yang terletak di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025, tepatnya pada bulan September.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Budiana dkk: 2020), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang orang yang diamati. Fadli (2021), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Artinya penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistic, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang.

Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan suatu analisis serta interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Abdussamad (2021), juga mengemukakan bahwa metode

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Data ini terdiri dari wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah untuk memahami proses penyusunan, alokasi, dan pengelolaan anggaran kegiatan sekolah. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, referensi, dokumen dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data ini mencakup dokumen-dokumen kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan RKAS, seperti peraturan pemerintah dan pedoman dari Dinas Pendidikan yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan RKAS di sekolah. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru dan Ketua Komite. Untuk mendapatkkan data yang lengkap digunakan teknik pengumpulan data yang sesuai. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Dalam proses analisis data terdiri dari tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data pada penelitian ini divalidasi dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran data atau informasi melalui sumber yang berbeda. Misalnya, selain memanfaatkan wawancara dan observasi peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, dokumen sejarah, arsip, catatan resmi atau pribadi dan gambar Cahya (2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan RKAS SD Negeri 01 Tolisu Tahun 2021 – 2024

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Negeri 01 Tolisu dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya perkembangan dan penyesuaian dalam prosedur meskipun inti prosesnya tetap sama. Pada tahun 2021, RKAS disusun berdasarkan Juknis No. 6 Tahun 2021 yang memuat tiga tahapan utama, yaitu persiapan, penyusunan, dan pengesahan. Setiap tahapan memiliki langkah-langkah yang jelas, dimulai dengan pembentukan Tim BOS (bukti dukung terlampir), perencanaan anggaran, hingga pengesahan oleh pihak-pihak terkait. Tahapan yang rinci ini memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi penyusunan anggaran sekolah.

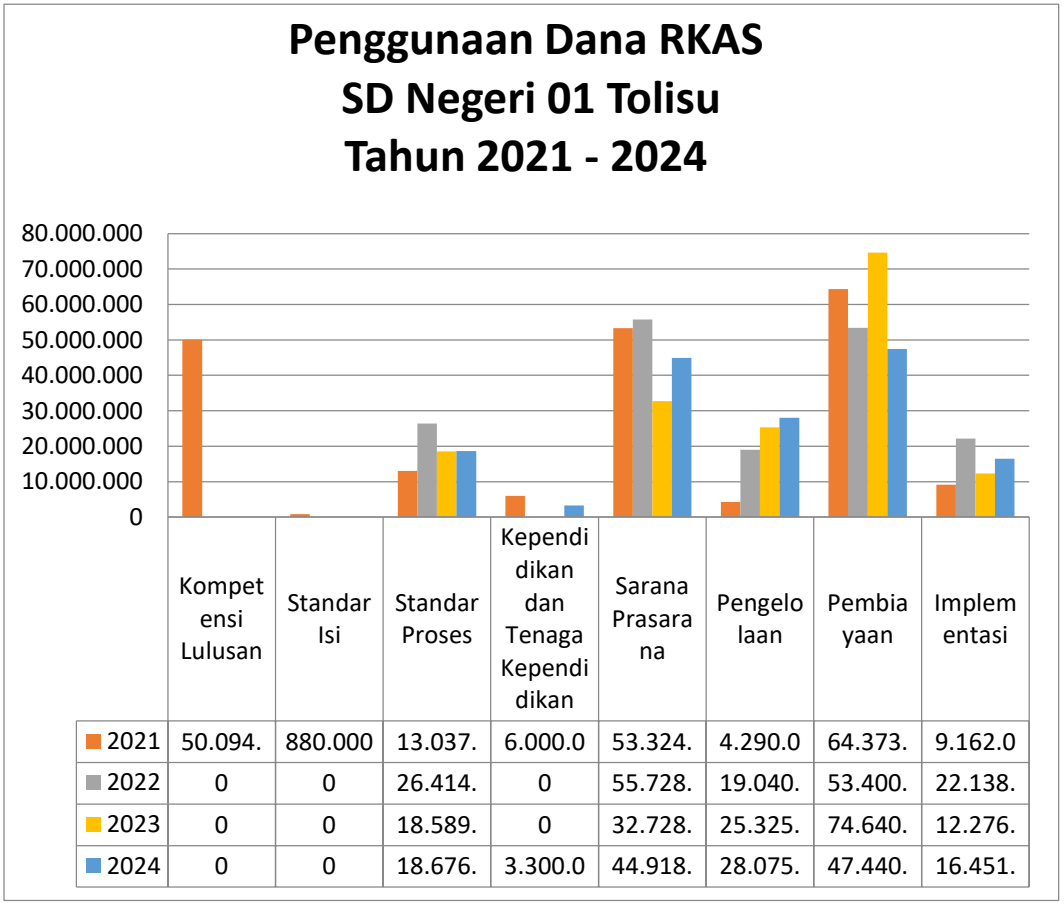
Namun, pada tahun 2022 dan 2023, perubahan terjadi dengan diterapkannya Juknis No. 63 Tahun 2022, yang menyederhanakan tahapan menjadi hanya satu tahapan besar, yaitu perencanaan. Meskipun disatukan, tahapan perencanaan ini mencakup tiga langkah yang sebelumnya terpisah, yakni pembentukan tim BOS, penyusunan RKAS, pengesahan, dan input RKAS ke dalam aplikasi ARKAS. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi dalam penyusunan anggaran, namun tetap menjaga keterlibatan seluruh pihak dalam prosesnya. Dengan demikian, meskipun ada perubahan dalam regulasi, prinsip transparansi dan kolaborasi tetap dipertahankan dalam penyusunan RKAS.

Pada tahun 2024, SD Negeri 01 Tolisu kembali mengacu pada Juknis No. 63 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Juknis tahun sebelumnya. Meskipun ada pembaruan dalam petunjuk teknis, tahapan penyusunan RKAS tetap tidak berubah, yakni berfokus pada satu

tahapan perencanaan yang mencakup langkah-langkah yang serupa dengan tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan upaya konsistensi dalam pengelolaan RKAS meskipun ada perubahan dalam regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa proses yang lebih sederhana dan efisien tidak mengurangi kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh sekolah.

Proses penyusunan RKAS di SD Negeri 01 Tolisu dimulai dengan penentuan Tim BOS, yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Ketua Komite, dan satu orang guru. Tim BOS ini memiliki peran penting dalam merumuskan kebutuhan sekolah yang akan dituangkan dalam RKAS. Langkah pertama adalah mengadakan rapat pertama dengan dewan guru dan bendahara sekolah untuk mendiskusikan dan menentukan kebutuhan sekolah untuk semester tersebut. Pada rapat ini, dewan guru menyampaikan berbagai kebutuhan terkait proses pembelajaran yang harus diprioritaskan. Setelah draft RKAS disusun, rapat kedua dilakukan dengan melibatkan Bendahara Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, dan orang tua wali murid. Rapat ini bertujuan untuk memperlihatkan draft RKAS dan memberikan kesempatan bagi komite sekolah dan orang tua untuk memberikan masukan dan saran. Setelah memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak, proses pengesahan RKAS dilakukan dengan penandatanganan dokumen oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, satu orang guru, dan Komite Sekolah. Setelah RKAS disahkan, Bendahara Sekolah bertugas untuk menginput RKAS ke dalam aplikasi ARKAS, yang merupakan sistem digital untuk memonitor dan melaporkan kegiatan serta anggaran sekolah. Dengan demikian, proses penyusunan RKAS ini melibatkan kolaborasi yang erat antara sekolah, komite, dan orang tua dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Pelaksanaan RKAS SD Negeri 01 Tolisu Tahun 2021 – 2024



	Kompetensi Lulusan	Standar Isi	Standar Proses	Kependidikan dan Tenaga Kependidikan	Sarana Prasarana	Pengelolaan	Pembiayaan	Implementasi
2021	50.094.	880.000	13.037.	6.000.0	53.324.	4.290.0	64.373.	9.162.0
2022	0	0	26.414.	0	55.728.	19.040.	53.400.	22.138.
2023	0	0	18.589.	0	32.728.	25.325.	74.640.	12.276.
2024	0	0	18.676.	3.300.0	44.918.	28.075.	47.440.	16.451.

Gambar 1. Grafik Penggunaan Dana BOS Tahun 2021 - 2024

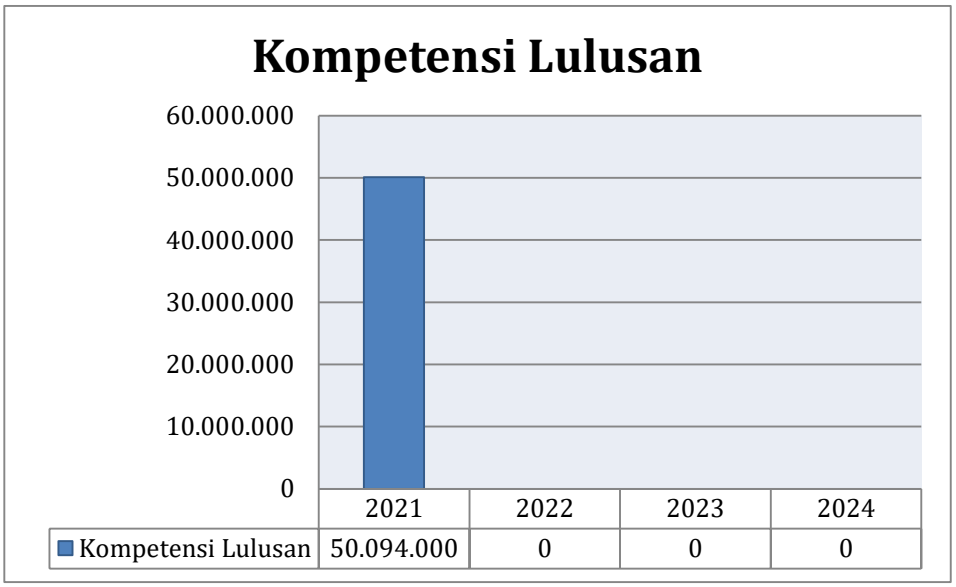
Dana BOS untuk pelaksanaan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) di SD Negeri 1 Tolisu mengalami penurunan setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah siswa dari tahun 2021 hingga 2024. Penurunan jumlah siswa menyebabkan berkurangnya total anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pendidikan. Meskipun demikian, alokasi dana terbesar setiap tahunnya tetap dialokasikan untuk standar pembiayaan, yang merupakan komponen pengeluaran tertinggi, menunjukkan bahwa pembiayaan tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan RKAS. Selain itu, terdapat peningkatan yang konsisten pada anggaran untuk standar pengelolaan, yang mencerminkan upaya untuk memperbaiki dan memperkuat manajemen kegiatan pendidikan dalam menghadapi tantangan yang ada. Dampak positif dari pengalokasian ini adalah terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efisien, sehingga meskipun terjadi penurunan anggaran, sekolah dapat tetap menjalankan kegiatan dengan lebih terarah dan terorganisir. Penggunaan RKAS dari tahun 2021 hingga 2024 juga dioptimalkan dengan tingkat serapan dana yang mencapai 100%, tanpa ada anggaran yang tersisa.

Pada sisi lain, pengeluaran untuk standar kompetensi lulusan dan standar isi hanya tercatat pada tahun 2021, dengan tidak adanya pengeluaran untuk kedua standar tersebut pada tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kedua standar tersebut tidak menjadi prioritas utama setelah 2021, seiring dengan penurunan jumlah siswa dan perubahan dalam kebutuhan anggaran. Standar proses juga menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan adanya perubahan dalam alokasi dana setiap tahunnya, yang mencerminkan adanya ketidakpastian dalam pengelolaan proses pendidikan dan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi. Meskipun demikian, fluktuasi ini juga memberikan dampak positif, yakni kemampuan sekolah untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam merespons perubahan kebutuhan serta memfokuskan anggaran pada area yang lebih mendesak atau prioritas.

Fluktuasi pengeluaran juga terlihat pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang hanya tercatat pada tahun 2021 dan 2024, dengan penurunan anggaran pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk tenaga pendidik tidak menjadi prioritas utama pada tahun-tahun tertentu, mengingat penurunan jumlah siswa yang mengurangi kebutuhan akan pengajaran. Sementara itu, standar pengembangan dan implementasi mengalami variasi yang cukup besar dalam alokasi anggaran setiap tahunnya, mencerminkan perubahan kebutuhan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang berlaku. Dampak positif dari variasi pengeluaran ini adalah tercapainya pengelolaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah, yang memungkinkan alokasi dana lebih tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan situasi terkini, serta mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan meskipun dengan anggaran yang terbatas. Secara keseluruhan, pergeseran pengalokasian dana dan fluktuasi pengeluaran ini menggambarkan adaptasi yang baik terhadap penurunan jumlah siswa dan perubahan prioritas, sekaligus memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran untuk keberlanjutan kegiatan pendidikan.

Berikut ini merupakan rincian pengalokasian dana untuk masing-masing standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Pengembangan dan Implementasi, serta bagaimana distribusi dana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing komponen.

a. Standar Kompetensi Lulusan



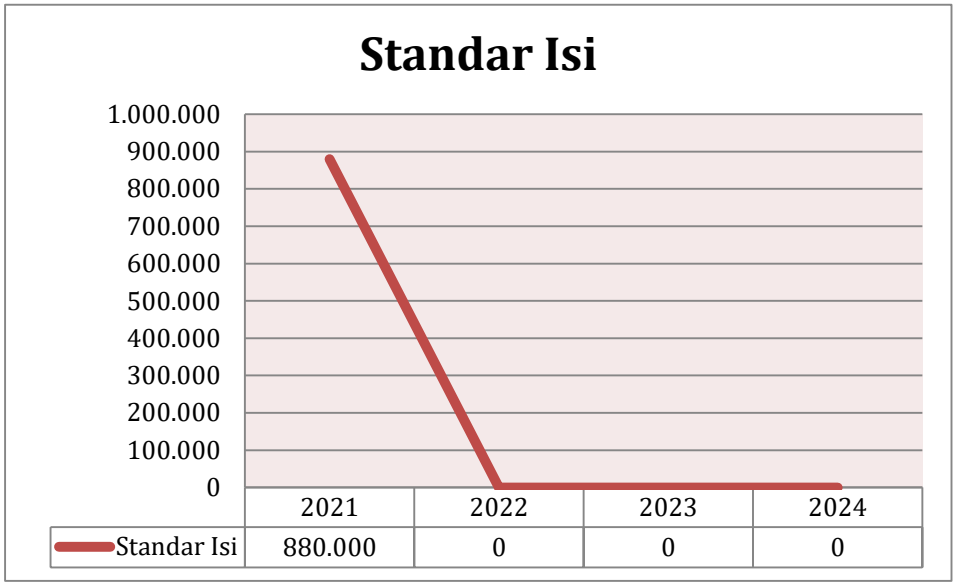
Gambar 2. Grafik Standar Kompetensi Lulusan

Penggunaan dana untuk standar kompetensi lulusan, terlihat bahwa pada tahun 2021, anggaran untuk keperluan ini mencapai angka tertinggi, yaitu sebesar Rp. 50.094.000. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan ujian dan penilaian kompetensi lulusan. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, dana untuk standar kompetensi lulusan tidak lagi dialokasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan perubahan kebijakan pendidikan dan situasi yang berkembang di sekolah.

Pada tahun 2022, SD Negeri 01 Tolisu sudah tidak lagi melaksanakan Ujian Nasional (UN) sebagai bagian dari evaluasi kelulusan siswa, seiring dengan kebijakan pemerintah yang menghapuskan UN sebagai syarat kelulusan. Dengan berakhirnya pelaksanaan UN, kebutuhan untuk berbagai peralatan dan fasilitas yang sebelumnya digunakan dalam ujian, seperti perangkat ujian, cetak soal, dan lainnya, menjadi tidak diperlukan lagi. Selain itu, pada tahun yang sama, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk penanggulangan pandemi COVID-19, seperti pendanaan pulsa untuk dewan guru melaksanakan pembelajaran secara daring, biaya transportasi untuk guru yang harus melakukan kunjungan disetiap minggunya, pengadaan peralatan kesehatan dan pelaksanaan protokol kesehatan, juga tidak lagi diperlukan, mengingat kondisi pandemi yang mulai terkendali dan sekolah yang kembali beroperasi secara normal.

Dengan demikian, mulai tahun 2022 hingga 2024, SD Negeri 01 Tolisu tidak lagi menganggarkan dana untuk standar kompetensi lulusan, karena kebutuhan tersebut sudah tidak relevan dengan kebijakan yang ada, serta situasi yang telah membaik setelah pandemi. Alokasi anggaran ini pun dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak dan sesuai dengan prioritas sekolah pada periode tersebut.

b. Standar Isi

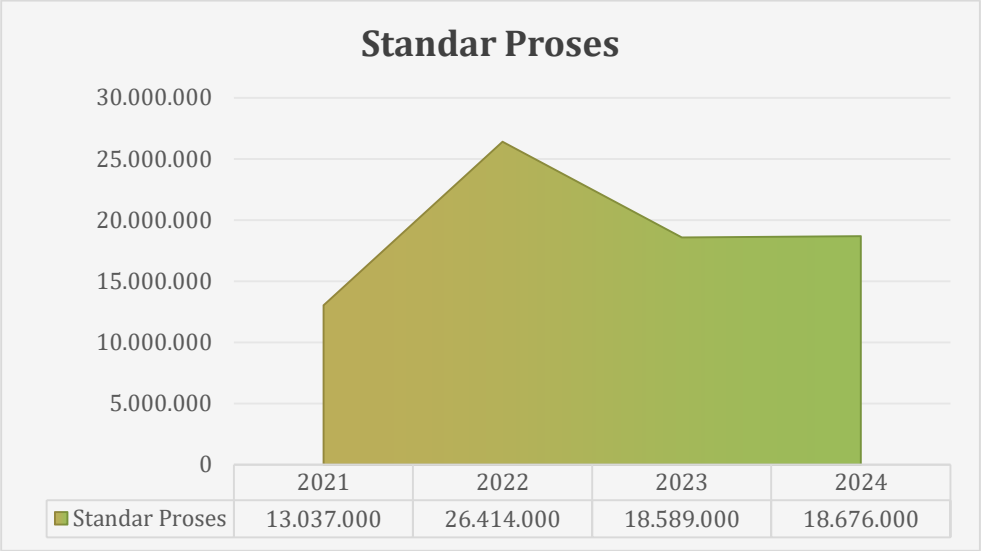


Gambar 3. Grafik Standar Isi

Alokasi dana untuk standar isi mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, penggunaan dana untuk standar isi mencapai jumlah tertinggi, yaitu sebesar Rp. 880.000. Dana ini digunakan untuk biaya konsumsi selama kegiatan penyusunan program tahunan, khususnya untuk implementasi Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan pada saat itu. Mengingat bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan yang relatif baru, sekolah memerlukan pelatihan intensif, yang diselenggarakan oleh sekolah penggerak terdekat. Kegiatan pelatihan ini melibatkan sejumlah pihak dari sekolah yang harus mengikuti sesi pembelajaran dan workshop terkait implementasi kurikulum, yang tentunya memerlukan biaya konsumsi untuk mendukung kelancaran acara.

Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, alokasi dana untuk standar isi mengalami perubahan, dan tidak ada penganggaran sama sekali untuk kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh pergeseran cara pelaksanaan pelatihan, yang mulai dilakukan secara lebih individual dan tidak terpusat. Dalam periode tersebut, pelatihan bagi guru dan staf sekolah lebih bersifat mandiri, dengan pelatihan yang dilakukan oleh masing-masing individu secara terpisah, baik secara daring maupun dengan sumber daya yang disediakan secara personal. Dengan pendekatan ini, biaya konsumsi yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan pelatihan tidak lagi diperlukan, karena pelatihan tidak lagi melibatkan pertemuan fisik atau kegiatan kelompok yang memerlukan fasilitas seperti makan bersama atau konsumsi. Sebagai hasilnya, pengalokasian dana untuk standar isi pada tahun-tahun tersebut tidak ada, seiring dengan pergeseran dalam metode pelatihan dan pembelajaran yang lebih efisien dan hemat biaya.

c. Standar Proses



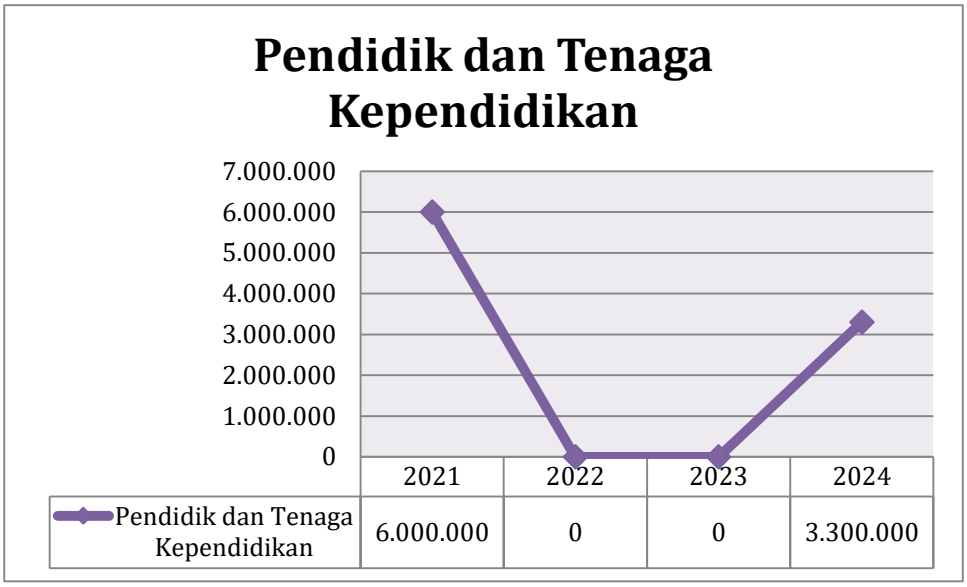
Gambar 4. Grafik Standar Proses

Penggunaan dana untuk standar proses pada tahun 2022 mencatatkan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, yaitu sebesar Rp. 26.414.000. Sementara itu, pada tahun 2021, anggaran yang dialokasikan untuk standar proses tercatat paling rendah, yakni hanya sebesar Rp. 13.000.000. Sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024, alokasi dana untuk standar proses berada pada kisaran yang hampir sama, yakni sekitar Rp. 18 juta lebih.

Peningkatan signifikan pada tahun 2022 dapat dijelaskan oleh pelaksanaan kegiatan Kemah Prestasi tingkat kabupaten yang tidak dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, kegiatan Kemah Prestasi diselenggarakan di Kecamatan Toili Jaya, yang mengharuskan SD Negeri 01 Tolisu sebagai salah satu sekolah yang berada dalam lingkup Kecamatan Toili Jaya untuk mengirimkan dua regu peserta. Kegiatan ini tentunya membutuhkan pengeluaran yang lebih besar, mengingat perlunya biaya untuk transportasi, akomodasi, dan berbagai fasilitas lain yang mendukung kelancaran acara, baik untuk peserta maupun pendamping.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024, kegiatan Kemah Prestasi diadakan di kecamatan berbeda, sehingga SD Negeri 01 Tolisu tidak diwajibkan untuk mengirim dua regu dan bisa jika hanya mengirimkan satu regu peserta saja. Dengan demikian, pengeluaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Hal ini terjadi karena jumlah peserta yang dikirimkan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi biaya transportasi dan akomodasi yang sebelumnya diperlukan dalam jumlah lebih besar. Oleh karena itu, meskipun kegiatan Kemah Prestasi tetap menjadi bagian dari kegiatan tahunan, perubahan dalam skala dan lokasi acara menyebabkan penurunan signifikan pada anggaran yang dikeluarkan oleh sekolah pada tahun 2023 dan 2024.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan



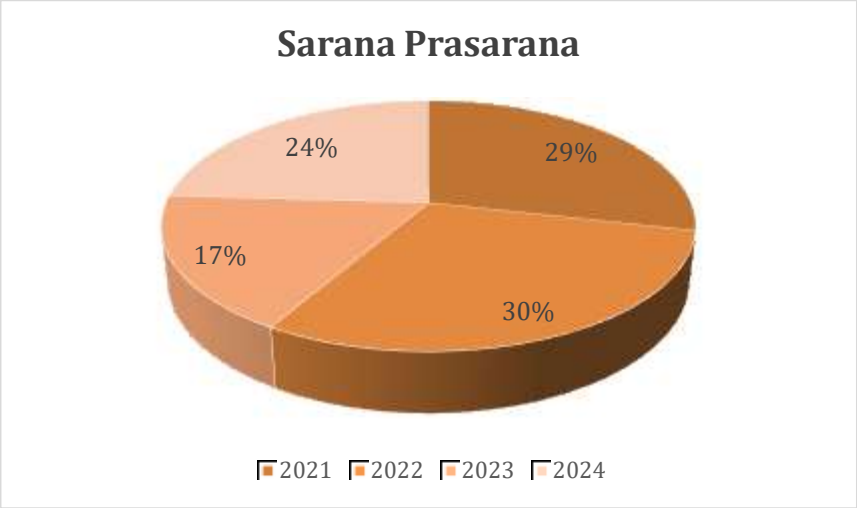
Gambar 5. Grafik Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Alokasi dana pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam alokasi dana dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, alokasi dana untuk standar ini tercatat yang paling besar, yaitu sebesar Rp. 6.000.000. Peningkatan dana pada tahun tersebut disebabkan oleh penerapan Kurikulum Merdeka, yang mengharuskan para guru mengikuti berbagai workshop terkait kurikulum baru. Kegiatan ini memerlukan biaya pendaftaran dan transportasi, terutama apabila workshop diadakan di pusat kabupaten, sehingga biaya tersebut harus ditanggung oleh sekolah.

Namun, pada tahun 2022 dan 2023, tidak ada pengalokasian dana untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2022, pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dibiayai sepenuhnya oleh provinsi, dan kegiatan pelatihan kabupaten umumnya hanya mencakup biaya transportasi dan konsumsi, yang sudah ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, pengadaan pemateri kabupaten yang mengunjungi beberapa kecamatan sekaligus, seperti Toili, Toili Jaya, dan Toili Barat, mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan oleh sekolah. Oleh karena itu, pengeluaran untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan pada tahun 2022 tidak diperlukan.

Pada tahun 2023, alokasi dana untuk standar ini juga tidak ada, karena pada tahun tersebut SD Negeri 01 Tolisu menerima dana BOS Kinerja, yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan sekolah, termasuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik, sehingga tidak diperlukan anggaran tambahan untuk pelatihan. Namun, pada tahun 2024, karena SD Negeri 01 Tolisu tidak lagi mendapatkan dana BOS Kinerja, maka alokasi dana untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan harus kembali dianggarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa dukungan dana BOS Kinerja, sekolah perlu mengalokasikan dana reguler untuk mendanai pelatihan dan peningkatan kompetensi pendidik di sekolah.

e. Standar Sarana Prasarana

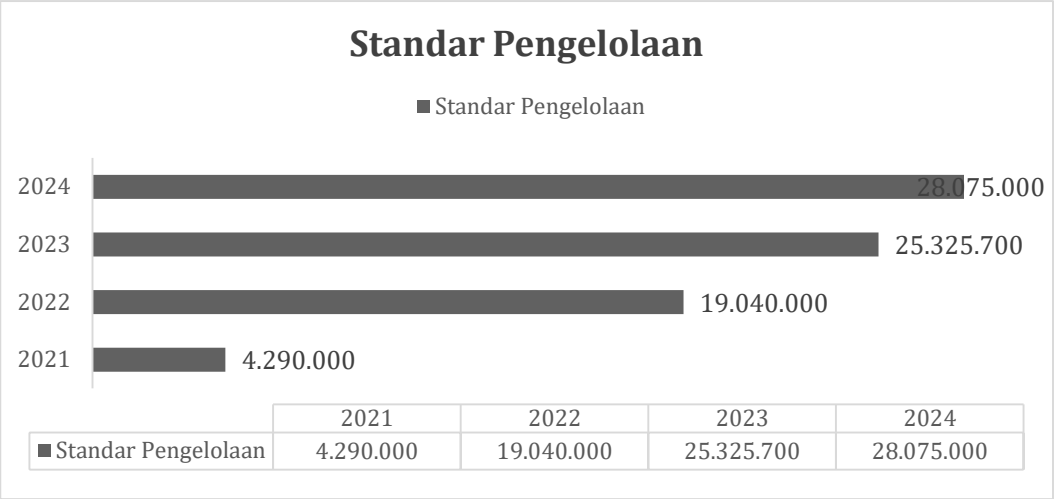


Gambar 6. Grafik Standar Sarana Prasarana

Pada tahun 2022, penggunaan dana untuk standar sarana dan prasarana tercatat mencapai jumlah terbesar, yaitu sebesar Rp. 55.728.000. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebutuhan mendesak di sekolah, antara lain penggantian meja dan kursi siswa yang sudah rusak parah, renovasi beberapa ruang kelas yang temboknya sudah pudar dan plafonnya rusak, serta pengadaan peralatan teknologi seperti printer, laptop, dan LCD proyektor untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi. Pengeluaran yang tinggi ini mencerminkan upaya sekolah untuk meningkatkan fasilitas fisik dan teknologi agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Sementara itu, pada tahun 2023, pengeluaran untuk standar sarana dan prasarana tercatat sebagai yang terendah, yaitu sebesar Rp. 32.325.700. Penurunan ini disebabkan oleh pengadaan yang lebih terbatas, di mana dana lebih banyak dialokasikan untuk membeli kebutuhan dasar seperti buku paket untuk guru dan siswa, papan pengumuman, serta beberapa peralatan teknologi seperti laptop dan printer. Karena tidak ada kebutuhan renovasi besar atau penggantian sarana yang rusak parah seperti pada tahun 2022, pengeluaran untuk sarana dan prasarana pada tahun 2023 cenderung lebih rendah dan lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rutin di sekolah.

f. Standar Pengelolaan

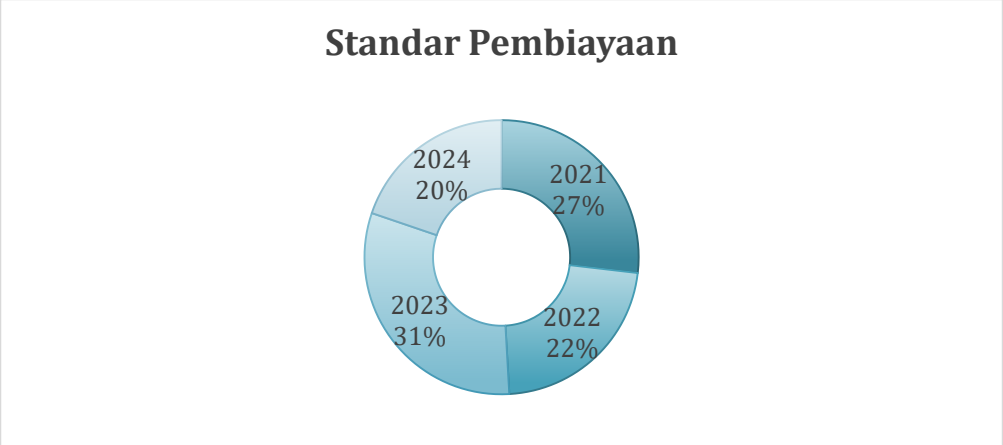


Gambar 7. Grafik Standar Pengelolaan

Penggunaan dana Standar Pengelolaan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, pengeluaran untuk standar pengelolaan tercatat sebagai yang terbesar, yaitu sebesar Rp. 28.075.000. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mendukung proses pembelajaran dan administrasi di sekolah, antara lain pengadaan bahan habis pakai seperti kertas, spidol, pulpen, serta tinta printer dan tinta spidol. Selain itu, pengeluaran juga digunakan untuk biaya kebersihan, listrik, dan jasa internet yang mendukung kelancaran operasional sekolah. Seiring dengan kembali normalnya kegiatan belajar mengajar dan administrasi yang melibatkan interaksi tatap muka, kebutuhan terhadap bahan-bahan habis pakai dan infrastruktur pendukung semakin meningkat pada tahun 2024.

Sebaliknya, pada tahun 2021, pengeluaran untuk standar pengelolaan tercatat sebagai yang paling rendah, yaitu hanya sebesar Rp. 4.290.000. Tahun 2021 masih merupakan masa pandemi COVID-19, di mana sebagian besar kegiatan administrasi dan pembelajaran dilakukan secara daring. Dengan beralihnya pembelajaran dan administrasi ke format online, kebutuhan akan bahan habis pakai seperti kertas, spidol, dan pulpen berkurang drastis, karena sebagian besar proses dilakukan melalui media digital. Selain itu, pendanaan untuk jasa internet atau pulsa data pada tahun 2021 telah dialihkan ke dalam anggaran untuk standar kompetensi lulusan, mengingat kebutuhan utama saat itu adalah mendukung kelancaran pelaksanaan ujian dan pembelajaran daring.

g. Standar Pembiayaan



Gambar 8. Grafik Standar Pembiayaan

Pada tahun 2023, penggunaan dana untuk standar pembiayaan tercatat sebagai yang tertinggi, yakni sebesar Rp. 74.640.000. Hal ini disebabkan oleh masih adanya lima guru honorer yang harus dibayarkan gajinya. Keberadaan lima guru honorer ini memerlukan anggaran yang cukup besar, mengingat gaji mereka harus dipenuhi setiap bulannya. Selain itu, pada tahun 2023, pengeluaran untuk standar pembiayaan juga mencakup biaya-biaya lain yang terkait dengan operasional sekolah, tetapi yang paling signifikan adalah pembiayaan gaji guru honorer. Jumlah guru honorer yang relatif banyak pada tahun tersebut menyebabkan anggaran untuk pembiayaan semakin besar, karena sekolah masih bergantung pada tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pengajaran.

Sementara itu, pada tahun 2024, penggunaan dana untuk standar pembiayaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan total anggaran yang hanya sebesar Rp. 47.440.000. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru honorer yang harus digaji. Pada tahun 2024, hanya ada tiga guru honorer yang masih aktif di sekolah, karena satu guru honorer telah lulus tes P3K dan diangkat menjadi ASN, sementara satu guru lainnya memilih untuk keluar dari sekolah. Dengan berkurangnya jumlah guru honorer, kebutuhan dana untuk gaji mereka otomatis menurun, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan gaji tenaga pengajar juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, meskipun ada pengeluaran lainnya untuk operasional sekolah, pengurangan jumlah guru honorer menjadi faktor utama yang menyebabkan pengurangan total anggaran pada standar pembiayaan di tahun 2024. Sebagai akibatnya, meskipun sekolah tetap membutuhkan dana untuk kebutuhan operasional lainnya, beban terbesar yang sebelumnya ada pada pembayaran gaji guru honorer kini lebih ringan, sehingga alokasi dana untuk standar pembiayaan pun menurun.

h. Standar Pengembangan dan Implementasi



Gambar 9. Grafik Standar Pengembangan dan Implementasi

Tahun 2022 mencatatkan pengeluaran tertinggi untuk standar pengembangan dan implementasi, dengan total dana yang mencapai Rp. 22.138.000. Peningkatan signifikan ini disebabkan oleh pelaksanaan Assesment Nasional, yang mengharuskan sekolah untuk membayar berbagai pihak terkait, seperti proktor, teknisi, dan pengawas ujian, serta memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Kegiatan Assesment Nasional ini, yang melibatkan koordinasi yang lebih kompleks dan pengadaan tenaga ahli, menyebabkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebaliknya, pengeluaran untuk standar yang sama tercatat paling rendah pada 2021, hanya sebesar Rp. 9.162.000. Hal ini disebabkan oleh fokus anggaran yang lebih sederhana, hanya untuk keperluan ujian rutin seperti ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tanpa adanya kegiatan besar seperti Assesment Nasional, yang memerlukan banyak sumber daya tambahan, dana yang dibutuhkan untuk pengembangan dan implementasi kegiatan di tahun tersebut lebih terbatas dan difokuskan pada kebutuhan administratif serta evaluasi rutin pembelajaran.

Pelaporan RKAS SD Negeri 01 Tolisu Tahun 2021 – 2024

Proses pelaporan RKAS di SD Negeri 01 Tolisu dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dikatakan relatif konsisten, meskipun ada beberapa perbedaan terkait dengan perubahan tahapan proses pencairan dana yang mempengaruhi mekanisme pelaporannya. Pada tahun 2021 dan 2022, proses pencairan dana dilakukan dalam tiga tahap, sehingga pelaporan dana juga disusun dalam tiga tahap yang terpisah sesuai dengan pencairan tersebut. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, seiring dengan perubahan kebijakan yang menetapkan proses pencairan dana hanya dalam dua tahap, mekanisme pelaporan juga disesuaikan menjadi dua tahap. Meskipun terdapat perubahan dalam jumlah tahap pencairan dan pelaporan, prosedur penyusunan laporan tetap tidak berubah. Proses penyusunan laporan RKAS tetap melibatkan sejumlah dokumen pendukung yang wajib dilampirkan, seperti SK Tim BOS, bukti kwitansi, faktur, Buku Kas Umum (BKU), buku bank, dan berbagai bukti transaksi lainnya yang relevan.

Namun, pada tahun 2022, terdapat perbedaan signifikan dalam proses pelaporan RKAS di SD Negeri 01 Tolisu, yaitu adanya proses audit yang dilakukan oleh dinas pendidikan setempat. Audit ini mengungkapkan temuan penting terkait ketidaklengkapan dokumen pada

laporan pertanggungjawaban (LPJ), khususnya terkait dengan tidak tercantumnya Surat Keputusan (SK) guru honorer sebagai bagian dari bukti penggunaan dana pembayaran gaji guru honorer. Temuan ini menjadi perhatian serius, karena keberadaan SK guru honorer sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Akibat temuan tersebut, dinas pendidikan setempat memberikan instruksi untuk merevisi LPJ dengan menyertakan SK guru honorer sebagai salah satu bukti penggunaan dana untuk gaji guru honorer. Langkah ini mencerminkan pentingnya kesesuaian antara dokumen yang dilaporkan dan data yang sebenarnya, serta memastikan bahwa seluruh alokasi dana digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak sekolah perlu melakukan penyesuaian dengan memasukkan dokumen yang sah dan sesuai, guna memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh dinas pendidikan.

Meskipun revisi tersebut sempat menjadi kendala dalam pelaporan pada tahun 2022, hal ini justru memberikan pembelajaran berharga bagi SD Negeri 01 Tolisu dalam meningkatkan ketelitian dan transparansi dalam pengelolaan RKAS. Sejak itu, proses pelaporan menjadi lebih cermat dan sesuai dengan pedoman yang ada. Dengan adanya pengalaman tersebut, sekolah menjadi lebih waspada dalam menyusun dan memeriksa laporan keuangan agar tidak ada kekeliruan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, meskipun ada perubahan kecil dalam prosedur akibat audit, secara keseluruhan proses pelaporan RKAS tetap dapat berjalan lancar dan sesuai harapan.

Transparansi Implementasi RKAS SD Negeri 01 Tolisu

SD Negeri 01 Tolisu telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dalam implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini tercermin dalam proses penyusunan RKAS yang melibatkan berbagai pihak, seperti Komite Sekolah dan orang tua murid, melalui rapat bersama. Selain itu, setiap bulan pihak sekolah mengadakan pertemuan dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana, termasuk pengeluaran yang terjadi pada bulan tersebut. Proses ini memastikan bahwa semua phak yang terlibat dapat memantau dan mengetahui secara langsung bagaimana anggaran sekolah dikelola.

Lebih lanjut, SD Negeri 01 Tolisu juga mendokumentasikan secara terperinci barang-barang dan kegiatan yang didanai oleh Dana BOS, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK), kertas, serta pemeliharaan fisik sekolah seperti pengecatan gedung. Pihak sekolah secara rutin memperbarui papan informasi yang memuat rincian pemasukan dan pengeluaran Dana BOS, yang dapat diakses oleh Dewan Guru dan orang tua murid. Dengan cara ini, transparansi pengelolaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan seluruh pihak terhadap pengelolaan dana di sekolah.

Akuntabilitas Implementasi RKAS SD Negeri 01 Tolisu

Prinsip akuntabilitas dalam implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Negeri 01 Tolisu mengacu pada sejauh mana sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan cara yang transparan, sesuai dengan peruntukannya, dan memberikan hasil yang optimal. Akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama masyarakat dan pihak terkait, terhadap pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikelola oleh sekolah.

Di SD Negeri 01 Tolisu, akuntabilitas tercermin dari upaya sekolah dalam menyusun dan melaporkan penggunaan dana RKAS secara transparan dan terstruktur. Setiap tahunnya, sekolah mengalokasikan dana untuk berbagai standar kegiatan, seperti sarana prasarana, pengembangan dan implementasi, pembiayaan tenaga pendidik, serta standar pengelolaan lainnya, dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap. Laporan pertanggungjawaban

penggunaan dana disusun dengan melampirkan bukti-bukti yang valid, seperti kwitansi, faktur, Buku Kas Umum (BKU), serta bukti transaksi lainnya yang mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah berusaha untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diaudit oleh pihak yang berwenang, seperti Dinas Pendidikan atau Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, akuntabilitas juga tercermin dalam proses pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak sekolah, termasuk bendahara BOS, kepala sekolah, serta tim pengelola anggaran lainnya. Setiap penggunaan dana dievaluasi dan dipastikan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui. Sekolah juga melakukan verifikasi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Proses ini penting untuk menjaga agar alokasi anggaran tetap fokus pada prioritas kegiatan yang mendukung tujuan pendidikan.

Selama periode 2021 hingga 2024, SD Negeri 01 Tolisu juga berusaha menjaga akuntabilitas dalam laporan penggunaan dana melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara berkala. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana sekolah juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas. Masyarakat, terutama komite sekolah, diberikan akses untuk mengetahui alokasi dan penggunaan dana, sehingga dapat turut serta dalam memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan sebaik-baiknya.

Namun, meskipun terdapat upaya yang baik dalam menjaga akuntabilitas, tantangan tetap ada dalam hal pengelolaan dan pelaporan dana yang memadai, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan atau alokasi dana yang tidak sesuai dengan perencanaan semula. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk terus meningkatkan kapasitas dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan, serta mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak terkait mengenai pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip akuntabilitas di SD Negeri 01 Tolisu sudah berjalan dengan baik, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan transparansi, pengawasan yang ketat, serta perbaikan sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sekolah. Hal ini akan memastikan bahwa dana yang digunakan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi perkembangan pendidikan di sekolah tersebut.

Fleksibilitas Implementasi RKAS SD Negeri 01 Tolisu

Prinsip fleksibilitas dalam implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Negeri 01 Tolisu menunjukkan sejauh mana sekolah dapat menyesuaikan anggaran dan kegiatan yang direncanakan dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi sepanjang tahun anggaran. Fleksibilitas ini penting agar alokasi dana tetap relevan dan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan meskipun terjadi perubahan, baik yang bersifat internal (seperti perubahan kebutuhan atau perencanaan ulang kegiatan) maupun eksternal (seperti perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi alokasi dana).

Pada SD Negeri 01 Tolisu, prinsip fleksibilitas terlihat dari kemampuan sekolah untuk menyesuaikan penggunaan dana sesuai dengan perubahan kebutuhan yang terjadi setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2022, sekolah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk renovasi sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan teknologi seperti laptop, printer, dan proyektor. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembelajaran tatap muka dan kebutuhan administrasi yang meningkat, setelah pembelajaran daring yang dilakukan pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, alokasi dana yang lebih terbatas dan terfokus pada kegiatan yang bersifat daring, seperti pengadaan pulsa data dan perangkat IT untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, menunjukkan bahwa anggaran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak saat itu.

Fleksibilitas juga tercermin dalam pengelolaan dana untuk pelatihan dan pengembangan guru. Seiring dengan perubahan kebijakan, seperti penerapan Kurikulum Merdeka, sekolah mampu menyesuaikan anggaran untuk menyelenggarakan workshop dan pelatihan yang mendukung kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum baru. Pada tahun 2021 dan 2022, dana dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru, baik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan terdekat.

Namun, fleksibilitas juga diuji ketika terjadi perubahan kebijakan, seperti pengurangan jumlah guru honorer pada tahun 2024 yang mengurangi alokasi dana untuk gaji guru honorer. Meskipun demikian, sekolah dapat menyesuaikan anggaran dengan pengurangan jumlah guru honorer, mengalokasikan dana yang lebih sedikit untuk pembiayaan tersebut, dan fokus pada kebutuhan lainnya yang lebih mendesak, seperti pengadaan bahan habis pakai dan biaya operasional.

Dengan demikian, implementasi RKAS di SD Negeri 01 Tolisu menunjukkan tingkat fleksibilitas yang baik, karena anggaran dan kegiatan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi yang ada. Untuk meningkatkan fleksibilitas ini di masa depan, penting bagi sekolah untuk terus memantau perkembangan situasi dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran secara berkala. Hal ini akan memungkinkan sekolah untuk cepat beradaptasi dengan kebijakan dan kondisi yang berubah, serta memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Efektivitas Implementasi RKAS SD Negeri 01 Tolisu

Prinsip efektivitas dalam implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Negeri 01 Tolisu dapat dilihat dari sejauh mana dana yang dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan apakah anggaran tersebut memberikan dampak yang optimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Efektivitas RKAS diukur dari kemampuan sekolah dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan, baik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran, pengelolaan sarana dan prasarana, maupun pengembangan kompetensi tenaga pendidik.

Pada SD Negeri 01 Tolisu, prinsip efektivitas terlihat jelas dari bagaimana penggunaan dana RKAS berorientasi pada pemenuhan kebutuhan utama yang mendukung proses belajar mengajar. Misalnya, alokasi dana untuk sarana dan prasarana pada tahun 2022 digunakan secara maksimal untuk renovasi fasilitas sekolah dan pengadaan peralatan teknologi, seperti laptop, proyektor, dan printer. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif, mengingat pentingnya fasilitas pendukung yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar siswa.

Selain itu, efektivitas juga tercermin dari pengelolaan dana untuk standar kompetensi lulusan dan pengembangan tenaga pendidik. Pada tahun-tahun tertentu, seperti tahun 2021 dan 2022, dana digunakan untuk pelatihan dan workshop yang meningkatkan kualitas kompetensi guru, sesuai dengan kebutuhan kurikulum merdeka yang sedang diterapkan. Pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik dapat terlihat dari dampak positif terhadap kinerja guru dan peningkatan kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh siswa.

Namun, meskipun banyak alokasi dana yang sesuai dengan tujuan pendidikan, tantangan dalam penerapan prinsip efektivitas muncul ketika ada perubahan kebijakan, seperti pengurangan jumlah guru honorer yang memengaruhi anggaran untuk pembiayaan gaji tenaga pengajar pada tahun 2024. Pengurangan jumlah guru honorer yang mengakibatkan berkurangnya alokasi dana untuk standar pengelolaan juga mempengaruhi efektivitas implementasi RKAS dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.

Secara keseluruhan, implementasi RKAS di SD Negeri 01 Tolisu menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, meskipun beberapa tantangan dalam hal perencanaan dan alokasi

anggaran yang terpengaruh oleh perubahan kebijakan tetap ada. Efektivitas penggunaan dana RKAS bergantung pada kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sehingga, untuk meningkatkan efektivitasnya, penting bagi sekolah untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Efisiensi Implementasi RKAS SD Negeri 01 Tolisu

Prinsip efisiensi dalam implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Negeri 01 Tolisu mengacu pada upaya untuk mengelola dan menggunakan dana secara optimal, yaitu dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Efisiensi bukan hanya tentang pengurangan biaya, tetapi lebih pada pengelolaan sumber daya yang ada secara cermat dan bijaksana agar hasil yang dicapai sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Di SD Negeri 01 Tolisu, prinsip efisiensi tercermin dari cara sekolah mengelola anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas dan urgensi kegiatan yang harus dilaksanakan. Misalnya, pada tahun 2022, ketika terjadi pengeluaran terbesar untuk renovasi sarana dan prasarana, termasuk pengadaan alat teknologi (seperti laptop, printer, dan proyektor), alokasi dana tersebut dilakukan dengan sangat terfokus pada perbaikan fasilitas yang sangat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran untuk kebutuhan yang memang mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran.

Selain itu, dalam pengelolaan dana untuk pelatihan dan pengembangan guru, SD Negeri 01 Tolisu menerapkan prinsip efisiensi dengan memilih kegiatan pelatihan yang relevan dan strategis. Dana yang dialokasikan untuk pelatihan guru pada tahun 2021 dan 2022 digunakan untuk mendukung perubahan kurikulum dan pengembangan kompetensi pengajaran yang lebih efektif. Sekolah juga memanfaatkan pelatihan yang diadakan oleh provinsi atau kabupaten untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh sekolah, seperti biaya transportasi atau pendaftaran.

Namun, meskipun sudah ada upaya efisiensi yang baik, beberapa tantangan dalam hal efisiensi penggunaan dana masih tetap ada, terutama terkait dengan alokasi dana untuk kegiatan yang kurang relevan atau tidak mendesak. Misalnya, pada tahun 2024, ketika alokasi dana untuk standar pengelolaan mengalami penurunan, sekolah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran, terutama terkait dengan pengeluaran untuk kebutuhan operasional dan bahan habis pakai. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana menjadi sangat penting agar setiap pengeluaran dapat memberikan dampak yang maksimal dan tidak ada pemborosan sumber daya.

Secara keseluruhan, prinsip efisiensi dalam implementasi RKAS di SD Negeri 01 Tolisu dapat dikatakan sudah diterapkan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Untuk meningkatkan efisiensi ke depannya, sekolah disarankan untuk terus melakukan evaluasi terhadap pengeluaran dan memperhatikan prioritas kegiatan yang mendukung tujuan pendidikan utama. Selain itu, penting juga bagi sekolah untuk memanfaatkan sumber daya eksternal, seperti pelatihan yang didanai oleh pemerintah daerah atau pihak lain, guna mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh sekolah. Dengan demikian, penggunaan dana dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di SD Negeri 01 Tolisu.

KESIMPULAN

Proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Negeri 1 Tolisu dari tahun 2021 hingga 2024 telah dilakukan dengan baik sesuai dengan

juknis yang berlaku, sesuai ketentuan yang berlaku, dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti komite sekolah dan orang tua murid. Meskipun terjadi perubahan kebijakan, seperti pengurangan tahap pencairan dana, sekolah tetap menjaga kelancaran perencanaan anggaran. Pelaksanaan RKAS juga telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Juknis yang berlaku, pengelolaan anggaran ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana, tetapi juga mendukung keberlanjutan kegiatan pendidikan yang berkualitas. Penggunaan dana setiap tahunnya dioptimalkan, dengan tingkat serapan mencapai 100%, tanpa ada anggaran yang tersisa, mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Proses pelaporan RKAS di SD Negeri 1 Tolisu dilakukan dengan baik meskipun ada kendala pada tahun 2022 terkait ketidaklengkapan dokumen, yang kemudian diperbaiki. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akurasi dan ketelitian dalam penyusunan laporan. SD Negeri 1 Tolisu juga menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana. Pengumuman penggunaan dana secara rutin kepada Dewan Guru, Komite Sekolah, dan orang tua murid membangun kepercayaan, sementara laporan penggunaan dana yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan mencerminkan akuntabilitas. Sekolah juga menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang muncul, serta efektivitas dalam mendukung tujuan pendidikan, seperti renovasi sarana dan prasarana serta pelatihan guru untuk Kurikulum Merdeka. Meskipun ada tantangan terkait kegiatan yang kurang relevan, penggunaan dana secara keseluruhan dilakukan dengan efisien, meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan alokasi anggaran.

REFERENSI

Aeni, S. N. (2022, March 30). Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya. Katadata.Co.Id

Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Adnyani, K. Y. (2023). *Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Terhadap Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Di Kabupaten Buleleng* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha). https://repo.undiksha.ac.id/15616/

Budiana, S., Nurjaman, A., & Sa'adah, N. (2022). Analisis Model PembelajaranDiscovery Learning Dalam Tiga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(Rpp) Teks Laporan Hasil Observasi Kelas VII Smp Di Kota Bogor. *Triangulasi: Jurnal Pendidikan Kebahasaan, Kesastraan, DanPembelajaran.* DOI: **10.55215/triangulasi.v1i2.4348,**https://journal.unpak.ac.id/index.php/triangulasi/article/view/4348

Cahya, A. D., Rahmadani, D. A., Wijiningrum, A., & Swasti, F. F. (2021).Analisis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. *YUME: Journal of Management.* DOI:https://doi.org/10.37531/yum.v4i2.870,https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/870

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*https://doi.org10.21831/hum.v21i1.38075.33-54

Huberman, M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods.

Lestari, A. (2023). Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah dan RencanaAnggaran Kegiatan Sekolah di SDIT Robbani Cendekia Ponorogo.*YASIN* https://doi.org/10.58578/yasin.v3i5.1543

Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN SindangsariIII.*Pandawa.* *https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/1005/699*

Novrialdi, R., & Sujianto, S. (2024). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir. *Journal of Research and Development on Public Policy.* https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.165

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No.6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. https://drive.google.com/file/d/13C6frbh9ItJF7SdUXyb1KCFohaj8sNY/view

Pengaturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No.6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dasan BAntuan Operasional Sekolah. https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/peraturan/Permendikbudristek%20Nomor%2063%20Tahun%20202201_compressed.pdf

Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*.https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.34447

Sebidi, S. D., Aina, A. Y., & Kgwete, E. M. (2023). Auditing public schools' financial records: A study of financial management from the eyes of relevant stakeholders. *Perspectives in Education.*https://hdl.handle.net/10520/ejc-persed_v41_n4a17

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. J1. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.

Suwarno, G., & Musafik, M. N. (2022). Implementasi Aplikasi RKAS Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Studi kasus SDN 2 Bantengan dan SDS Muhammadyah Program Plus Tulungagung).

Utari, R. (2023). Modul Penyusunan RKAS Tahun 2021. Universitas Negeri Yogyakarta.https://staffnew.uny.ac.id/upload/132313278/pengabdian/MODUL+PENYUSUNAN+RKAS_RAHMANIA.pdf